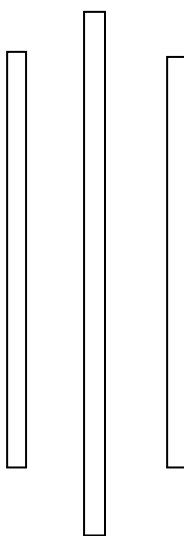




PERATURAN KALURAHAN SIDOREJO

NOMOR 5 TAHUN 2021

**TENTANG
REVIEW
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN
(RPJM Kalurahan)
PERIODE TAHUN 2016-2021**



**KAPANEWON LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa/Kalurahan adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebuah kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Kalurahan, maka Kalurahan diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kalurahan atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan).

RPJM Kalurahan Sidorejo ini merupakan rencana strategis Kalurahan Sidorejo untuk mencapai tujuan dan cita-cita Kalurahan. RPJM Kalurahan tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Kalurahan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Goverment*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan Mulai berlakunya Undang-undang tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Lokal bersekala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan mekanisme Pengambilan keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Keuangan Kalurahan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan administrasi Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa, dan Keadaan Mendesak Desa;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
30. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
31. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Kalurahan;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
37. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan tanah Desa Sidorejo;
38. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sususnan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kalurahan Sidorejo;
39. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
40. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan kalurahan;
41. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang penyertaan

Modal Kalurahan Sidorejo Pada Badan Usaha Milik Desa Sidorejo;

42. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Kondisi Kalurahan

2.1.1 Sejarah Kalurahan

Kalurahan Sidorejo adalah Kalurahan yang berasal dari penggabungan empat kelurahan lama yaitu Kelurahan Jurug, Kelurahan Senden, Kelurahan Tubin dan Kelurahan Ledok pada tahun 1946. Kemudian Kalurahan Sidorejo terus berkembang sampai sekarang dengan Kepemimpinan :

Tahun 1946 s.d 1949 Lurah Warso Utomo

Tahun 1949 s.d 1982 Lurah Kariyo Rejo/Radyo Menggolo

Tahun 1982 s.d 2005 Kepala desa Surti Wahyuni

Tahun 2005 s.d 2015 Kepala desa Sunardi

Tahun (2016-2021) Sutrisna sebagai Kepala Desa/Lurah terpilih

2.1.2 Demografi

a. Batas Wilayah Kalurahan

a. Letak geografi Kalurahan Sidorejo , terletak diantara :

- b. Sebelah Utara : Kalurahan Srikayangan, Gulurejo
- c. Sebelah selatan : Kalurahan Jatirejo
- d. Sebelah Barat : Kalurahan Jatirejo
- e. Sebelah Timur : Sungai Progo

b. Luas Wilayah Desa

- a. Pemukiman : 134,4000 ha
- b. Pertanian Sawah : 59,5250 ha
- c. Pekarangan/tegalan : 645,3265 ha
- d. Hutan : - ha
- e. Rawa-rawa : - ha
- f. Perkantoran : 0,3500 ha
- g. Sekolah : 1,0500 ha
- h. Jalan : 15 ha
- i. Lapangan sepak bola : 0,8000 ha

- c. Orbitasi
 - a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 2 Km
 - b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
 - c. Jarak ke ibu kota kabupetan : 27 Km
 - d. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 30 Menit

- d. Jumlah penduduk
 - 1. Berdasarkan Jumlah KK dan jenis kelamin
 - a.Kepala Keluarga : 2.825 KK
 - b.Laki-laki : 4.057 Orang
 - c.Perempuan : 4.130 Orang
 - 2. Berdasarkan Kelompok Umur

Umur (Tahun)	Laki- Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah
0-1	46	30	76
1	46	46	92
2	50	50	100
3	52	41	93
4	61	53	114
5	76	53	129
6	52	58	110
7	45	53	98
8	55	64	119
9	58	47	105
10	64	54	118
11	60	54	114
12	58	54	112
13	61	55	116
14	55	57	112
15	61	56	117
16	46	59	105
17	56	50	106
18	59	62	121
19	48	57	105

20	57	58	115
21	51	54	105
22	62	58	120
23	62	64	126
24	64	45	109
25	69	62	131
26	57	48	105
27	59	53	112
28	63	47	110
29	43	42	85
30	42	49	91
31	33	37	70
32	57	61	118
33	54	57	111
34	64	62	126
35	54	75	129
36	52	64	116
37	83	63	146
38	66	58	124
39	71	62	133
40	72	60	132
41	51	55	106
42	76	64	140
43	47	43	90
44	59	51	110
45	54	41	95
46	60	45	105
47	52	53	105
48	57	58	115
49	57	38	95
50	61	62	123
51	45	41	86
52	63	61	124

53	44	57	101
54	58	64	122
55	51	62	113
56	52	55	107
57	35	41	76
58	35	48	83
59	55	55	110
60	49	61	110
61	53	48	101
62	29	38	67
63	37	53	90
64	44	57	101
65	53	49	102
66	40	39	79
67	33	37	70
68	18	28	46
69	36	46	82
70	30	37	67
71	21	35	56
72	14	22	36
73	21	16	37
74	17	23	40
75	22	27	49
76	20	24	44
77	19	23	42
78	11	17	28
79	10	32	42
80	18	21	39
81	11	28	39
82	6	13	19
83	9	9	18
84	12	21	33
85	11	20	31

86	8	9	17
87	8	8	16
88	5	6	11
89	7	12	19
90	6	10	16
91	2	7	9
92	5	10	15
93	0	4	4
94	2	7	9
95	3	2	5
96	3	4	7
97	4	0	4
98	1	0	1
99	2	0	2
102	0	1	1
106	0	1	1
107	1	0	1

3. Menurut mata pencaharian

1. Belum/tidak bekerja	: 1368 orang
2. Mengurus Rumah Tangga	: 275 orang
3. Pelajar/mahasiswa	: 1259 orang
4. Pensiunan	: 67 orang
5. PNS	: 80 orang
6. TNI	: 20 orang
7. Kepolisian RI	: 9 orang
8. Perdagangan	: 7 orang
9. Petani/Pekebun	: 2039 orang
10. Peternak	: 7 orang
11. Industri	: 1 orang
12. Karyawan Swasta	: 316 orang
13.Karyawan BUMN	: 5 orang
14.Karyawan Honorer	: 7 orang
15.Buruh Harian Lepas	: 241 orang
16.Buruh tani/Perkebunan	: 180 orang
17.Buruh nelayan/Perikanan	: 6 orang

18.Buruh peternakan	:	7 orang
19.Pembantu Rumah Tangga	:	5 orang
20.Tukang Cukur	:	3 orang
21.Tukang Batu	:	4 orang
22.Tukang Kayu	:	1 orang
23.Tukang Las/Pandai Besi	:	2 orang
24.Tukang Jahit	:	5 orang
25.Tukang Gigi	:	1 orang
26.Mekanik	:	1 orang
27.Ustadz/Mubaligh	:	2 orang
28.Dosen	:	4 orang
29.Guru	:	65 orang
30.Dokter	:	1 orang
31.Bidan	:	2 orang
32.Perawat	:	9 orang
33.Peneliti	:	1 orang
34.Sopir	:	1 orang
35.Pedagang	:	55 orang
36.Perangkat Desa	:	22 orang
37.Kepala Desa	:	1 orang
38.Wiraswasta	:	2106 orang
39.Lainnya	:	1 orang

4. Menurut tingkat Pendidikan

a. Belum Tidak sekolah	:	1.665 Orang
b. Belum Tamat SD	:	928 Orang
c. Tamat SD	:	2.324 Orang
d. Tamat SMP	:	1.298 Orang
e. Tamat SMA	:	1.610 Orang
f. Diploma I/II	:	25 Orang
g. Diploma I/II	:	90 Orang
h. Strata I	:	235 Orang
j. Strata II	:	10 Orang
k. Strata III	:	2 Orang

5. Menurut Pemeluk Agama

a. Islam	:	8173 orang
b. Katolik	:	5 orang
c. Kristen	:	9 orang

- | | | | |
|----------|---|---|-------|
| d. Hindu | : | - | orang |
| e. Budha | : | - | orang |

1.1.3 Keadaan Sosial

a. Pendidikan

1. Lembaga Pendidikan

- | | | | |
|-------------------|---|----|------|
| a. Gedung TK/PAUD | : | 10 | buah |
| b. SD/MI | : | 6 | buah |
| c. SLTP/MTs | : | 1 | buah |
| d. SLTA/MA | : | - | buah |
| e. Lain-lain | : | 2 | buah |

b. Kesehatan

1. Kematian Bayi

- | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|-------|
| a. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini | : | 123 | orang |
| b. Jumlah Bayi meninggal tahun ini | : | - | orang |

2. Kematian Ibu Melahirkan

- | | | | |
|--|---|-----|-------|
| a. Jumlah ibu melahirkan tahun ini | : | 123 | orang |
| b. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini | : | - | orang |

3. Cakupan Imunisasi

- | | | | |
|------------------------------|---|----|-------|
| a. Cakupan Imunisasi Polio 3 | : | 88 | orang |
| b. Cakupan Imunisasi DPT-1 | : | 92 | orang |
| c. Cakupan Imunisasi Cacar | : | 72 | orang |

4. Gizi Balita

- | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------|
| a. Jumlah Balita | : | 523 | orang |
| b. Balita gizi buruk | : | - | orang |
| c. Balita gizi baik | : | 513 | orang |
| d. Balita gizi kurang | : | 10 | orang |

5. Pemenuhan air bersih

- | | | | |
|--------------------------|---|------|----|
| a. Pengguna sumur galian | : | 2107 | KK |
| b. Pengguna air PAM | : | 718 | KK |
| c. Pengguna sumur pompa | : | - | KK |
| d. Pengguna sumur HU | : | - | KK |
| e. Pengguna air sungai | : | - | KK |

c. Keagamaan

1. Data Tempat Ibadah

- | | | | |
|---------------------|---|----|------|
| a. Masjid/ Musholla | : | 29 | buah |
| b. Gereja | : | - | buah |

- c. Pura : - buah
- d. Vihara : - buah

2.1.4 Keadaan Ekonomi

- a. Pertanian
 - 1. Padi sawah : 59.5250 ha
 - 2. Padi Ladang : 15 ha
 - 3. Jagung : 70 ha
 - 4. Palawija : 124 ha
 - 5. Tembakau : - ha
 - 6. Tebu : 12 ha
 - 7. Kakao/ Coklat : - ha
 - 8. Sawit : - ha
 - 9. Karet : - ha
 - 10. Kelapa : 779 ha
 - 11. Kopi : - ha
 - 12. Singkong : 27 ha
 - 13. Lain-lain : 80 ha
- b. Peternakan
 - 1. Kambing : 898 ekor
 - 2. Sapi : 2174 ekor
 - 3. Kerbau : - ekor
 - 4. Ayam kampung : 13.770 ekor
 - 5. Itik : 350 ekor
 - 6. Puyuh : 85.000 ekor
 - 7. Lain-lain : - ekor
- c. Perikanan
 - 1. Tambak ikan : - ha
 - 2. Tambak udang : - ha
 - 3. Lain-lain : - ha

2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

2.2.1 Lembaga pemerintahan

- a. Lurah : 1 orang
- b. Pamong : 21 orang
- c. BPK : 9 orang

2.2.2. Lembaga kemasyarakatan

a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPMD	: 1 Kelompok
2. PKK	: 1 Kelompok
3. Posyandu	: 30 Kelompok
4. Pengajian	: 21 Kelompok
5. Arisan	: 21 Kelompok
6. Simpan Pinjam	: 11 Kelompok
7. Kelompok Tani	: 17 Kelompok
8. Gapoktan	: 1 Kelompok
9. Karang Taruna	: 15 Kelompok
10. Risma	: 21 Kelompok
11. Ormas/LSM	: - Kelompok
12. Lain-lain/ Orsos	: 1 Kelompok

2.2.3. Pembagian Wilayah Kalurahan

a. Nama Pedukuhan :

1. Pedukuhan Sapon	: Jumlah 6 (Enam) RT
2. Pedukuhan Gentan	: Jumlah 4 (Empat) RT
3. Pedukuhan Gerjen	: Jumlah 4 (Empat) RT
4. Pedukuhan Ledok	: Jumlah 7 (Tujuh) RT
5. Pedukuhan Sedan	: Jumlah 5 (Lima) RT
6. Pedukuhan Jekeling	: Jumlah 6 (enam) RT
7. Pedukuhan Tubin	: Jumlah 6 (Enam) RT
8. Pedukuhan Bekelan	: Jumlah 5 (Lima) RT
9. Pedukuhan Geden	: Jumlah 4 (Empat) RT
10. Pedukuhan Senden	: Jumlah 10 (Sepuluh) RT
11. Pedukuhan Karang	: Jumlah 4 (Empat) RT
12. Pedukuhan Diran	: Jumlah 7 (Tujuh) RT
13. Pedukuhan Kwarakan	: Jumlah 6 (Enam) RT
14. Pedukuhan Jurug	: Jumlah 6 (enam RT)

2.2.4. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

a. Nama Lurah : Sutrisna

b. Nama Pamong Kalurahan :

1. Carik	: Juwani
2. Panata Laksana Sarta Pangripta	: Suparno
3. Danarta	: Muh Hidayat, S.Pt.

4. Jagabaya	: Muh Thoyib, S.Kom.
5. Ulu-Ulu	: Sutaryono
6. Pth. Kamituwa	: Muh Thoyib, S.Kom.
7. Dukuh Sapon	: Sunardiyanta
8. Dukuh Gentan	: Handayani
9. Dukuh Gerjen	: Budi Prasetya
10. Dukuh Ledok	: Wakidi
11. Dukuh Sedan	: Yuliyanto, S.Pd.I.
12. Dukuh Jekeling	: Parjiya
13. Dukuh Tubin	: Waluyo
14. Dukuh Bekelan	: Wagiyo
15. Dukuh Geden	: M. Agus Triyono, SE
16. Dukuh Senden	: R. Wahyu Adi Nugroho
17. Dukuh Karang	: Rubiman
18. Dukuh Diran	: Mukri wiyarjo
19. Dukuh Kwarakan	: Waldi
20. Dukuh Jurug	: Riswawan

c. Nama dan Susunan BPK

1. Ketua	: Wakidi, S.Pd.
2. Wakil Ketua	: R. Sugita Raharja
3. Sekretaris	: Suparno
4. Ketua Bidang	: Dedy Mustofa
5. Ketua Bidang	: Sholikin
6. Anggota	: Annisha Riyanti Utami
7. Anggota	: Haravi Suyadi
8. Anggota	: Sidalwanto
9. Anggota	: Rumijem

BAB III POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi

3.1.1 Potensi Sumber Daya Alam

Kalurahan Sidorejo adalah kalurahan yang strategis dan memiliki keadaan alam yang masih terjaga. Secara Geografis berada di tepi Sungai Progo. Dan sebagian besar masyarakat mempunyai tanah pekarangan atau sawah yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pangan dan ekonomi. Potensi alam ini juga berpotensi menjadi sentral pengembangan Desa Wisata dan layak untuk dikunjungi wisatawan jika benar benar dapat dikelola dengan baik. Dan pengembangan di bidang Kepariwisata ini diharapkan mampu menunjang perekonomian masyarakat.

3.1.2 Potensi Sumber Daya Pembangunan

Kalurahan Sidorejo memiliki masyarakat yang masih mengedepankan semangat kegotong royongan dalam kehidupan kemasyarakatan ataupun dalam melaksanakan program pembangunan di tingkat paling bawah. Yaitu tingkat RT ataupun padukuhan. Semangat gotong royong ini juga mampu meningkatkan Swadaya masyarakat terkait pelaksanaan program Pembangunan yang ada di Padukuhan masing masing.

Potensi Sumber daya pembangunan yang bersifat dari kondisi alam dan geografis adalah berupa material non logam yang dapat diperoleh dengan mudah. Dan tersedia di wilayah masing masing wilayah. Yaitu berupa pasir dan Batu. Yang dapat menunjang swadaya masyarakat terkait program pembangunan yang ada.

3.1.3 Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Masyarakat Kalurahan Sidorejo adalah masyarakat yang majemuk. Memiliki tradisi soisal budaya yang sangat kuat dan secara turun temurun tradisi tersebut diwariskan ke generasi penerusnya. Dalam hal aktifitas sosial secara umum masyarakat Sidorejo selalu mengedepankan ke gotongroyongan dan musyawarah mufakat. Sehingga banyak lembaga kemasyarakatan yang ada di dalam masyarakat yang dapat menopang dan mendukung disetiap program pembangunan di masing masing wilayah tersebut ataupun program dari pemerintah kalurahan.

Kalurahan Sidorejo juga berstatus Desa Budaya. Diharapkan potensi ini mampu berkembang Menjadi Desa Budaya yang mandiri dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menu menu budayanya yang

dapat di minati oleh setiap pengunjung yang berkunjung di kalurahan Sidorejo. Dan tentunya mampu berkolaborasi dengan status Kalurahan Sidorejo yaitu pada saat ini juga menyandang status Desa Wisata.

3.2. Masalah

3.2.1 Masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Tata kelola administrasi pemerintah kalurahan yang belum maksimal
- b. Kurangnya Biaya Operasional sehingga Pelayanan Masyarakat dan Kegiatan Kepemerintahan belum dapat maksimal
- c. Masih terdapat masyarakat yang kurang peduli Kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan
- d. Masih belum maksimalnya penggunaan Sistem Informasi kalurahan dalam hal pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah Kalurahan.
- e. Masih belum terlaksana secara maksimal tentang update profil kalurahan.

3.2.2 Masalah Bidang Pembangunan

- a. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang Pembangunan baik mulai perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan hasil Kegiatan.
- b. Banyak kegiatan pembangunan yang belum bias terlaksana sesuai Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan setiap tahunnya. Dikarenanya keterbatasan Dana Transfer dan PAD yang tidak mencukupi.
- c. Pandemi Covid-19 yang membuat menurunnya target dalam kegiatan Pembangunan. Baik dalam Bidang Pembangunan Fisik dan Pembangunan Bidang Kesehatan masyarakat karena system pembangunan tidak bisa berjalan maksimal.

3.2.3 Masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Masih lemahnya Peran serta lembaga Kalurahan dalam proses pelaksanaan Pembangunan Kalurahan.
- b. Masih belum maksimalnya pengurus kelembagaan masyarakat sehingga berpengaruh pada pencapaian kinerja kelembagaan masyarakat.

- c. Kurangnya dukungan masyarakat terkait dengan program kelembagaan masyarakat sehingga harmonisasi kelembagaan dengan masyarakat kurang maksimal. Menyebabkan manfaat dan program kelembagaan tidak semua bisa dirasakan semua elemen masyarakat.
- d. Kegiatan pembinaan Masyarakat belum bisa berjalan optimal karena Pandemi Covid-19.

3.2.4 Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Masih lemahnya Sumber Daya Manusia bidang Ekonomi
- b. Belum terkelola dengan maksimal potensi Kalurahan yang dapat mengangkat atau memberikan kesejahteraan masyarakat
- c. Masih terdapat masyarakat yang berada digaris tingkat kurang mampu sehingga dalam memenuhi kebutuhan primernya belum mampu
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya masing masing. Yang dapat meningkatkan sumber pendapatan masyarakat.
- e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat belum bisa berjalan optimal karena Pandemi Covid-19.

BAB IV KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM KALURAHAN

4.1 Visi dan Misi

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Kalurahan yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Kalurahan sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun berjalan diharapkan proses penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Kalurahan Sidorejo dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.1.1 Visi

- a. TERBANGUNNYA SIDOREJO YANG BERSIH, SEHAT, SEJAHTERA DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN KALURAHAN YANG LEBIH BAIK.**

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Kalurahan Sidorejo baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Kalurahan Sidorejo mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

4.1.2. Misi

- a. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Kalurahan yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal;
- b. Bersama masyarakat dan kelembagaan Kalurahan menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
- c. Bersama masyarakat dan kelembagaan Kalurahan dalam mewujudkan Kalurahan Sidorejo yang aman, tentram dan damai;

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Tujuan diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) adalah :

- a. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Kalurahan, strategi pembangunan Kalurahan, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun berjalan.
- b. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Kalurahan selama enam tahun kedepan.
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Kalurahan yang akan dibiayai oleh APBKal, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
- d. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan pada tahun berikutnya.
- e. Sebagai media informasi dan evaluasi kinerja pemerintah Kalurahan terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun berjalan.

4.2.2 Sasaran

Masyarakat merupakan bagian terpenting dari pembangunan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Kalurahan.

Dengan demikian sasaran penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) adalah masyarakat itu sendiri .

Dengan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil pembangunan dapat tepat sasaran dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat miskin maupun masyarakat berkebutuhan khusus yang ada di Kalurahan.

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

5.1. Strategi Pencapaian

a. Strategi

Program Kalurahan Sidorejo dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b. Menetapkan Kalurahan Sidorejo sebagai Kalurahan yang lebih maju dalam membangun Kalurahan dengan kebersamaan. Fokus pengembangan ekonomi pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif sehingga dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Kalurahan..

- 1) Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
- 2) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
- 3) Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
- 4) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
- 5) Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius

d. Menetapkan prioritas pengembangan Kalurahan.

- 1) Pembangunan Kalurahan diarahkan pada infrastruktur di kalurahan
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana umum
- 3) Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

6.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Kalurahan

- a. Pendapatan Kalurahan bersumber APB Kalurahan dan Dana dari Pemerintah.
- b. Pendapatan dari APB Kalurahan dan dari Pemerintah dikelola oleh Bendahara Kalurahan.

6.2 Arah Pengelolaan Belanja Kalurahan

- a. Belanja Tunjangan Lurah dan Pamong;
- b. Insentif RT dan RW;
- c. Operasional Lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
- d. Tunjangan operasional BPK;
- e. Program operasional Pemerintahan Kalurahan;
- f. Program Pelayanan Dasar;
- g. Program pelayanan dasar infrastruktur;
- h. Program kebutuhan primer pangan;
- i. Program pelayanan dasar pendidikan;
- j. Program pelayanan kesehatan;
- k. Program kebutuhan primer Sandang;
- l. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- m. Program Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
- n. Program Ekonomi produktif;
- o. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Kalurahan;
- p. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
- q. Program dana bergulir.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM

Program Kalurahan diawali dari musyawarah Kalurahan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Kalurahan beserta BPK dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Kalurahan dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Kalurahan dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di Kalurahan, penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan, pemberdayaan masyarakat di Kalurahan, dan pembinaan kemasyarakatan menyepakati proses penyusunan yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

VIII PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

8.1 Program Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan

- a. Memfasilitasi semua Pamong kalurahan dengan Jaminan Sosial, yaitu jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- b. Penyediaan Operasional Pemerintah kalurahan demi kelancaran pelayanan masyarakat
- c. Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPK demi kelancaran tugas
- d. Penyediaan Operasional RT
- e. Peningkatan pelayanan kependudukan atau pelayanan masyarakat lainnya menggunakan aplikasi supaya lebih mudah dan efisien
- f. Mengupdate profil kalurahan sebagai arah kebijakan pembangunan kalurahan
- g. Penertiban pelaporan keuangan kalurahan disetiap bulan
- h. Penertiban penyusunan Peraturan Kalurahan wajib sesuai siklus tahunan dan aturan yang ada
- i. Pengelolaan dan Pengadministrasian aset kalurahan
- j. Memaksimalkan Sistem Informasi kalurahan berbasis teknologi

8.2 Program Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

- a. Penyediaan Operasioanal penyelenggaraan PAUD dan honor Tenaga Pendidik
- b. Penyediaan Honor Ustad dan Oprasional TPA
- c. Pengelolaan perpustakaan Kalurahan
- d. Penyelenggaraan Posyandu
- e. Peningkatan kawasan tanpa rokok
- f. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- g. Penyelenggaraan Kelas Ibu hamil
- h. Pelaksanaan Pemberantasan sarang Nyamuk
- i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana Jalan kalurahan dengan Pembangunan Bangket Jalan
- k. Pelaksanaan Prgram Bedah Rumah RTLH
- l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman untuk mengurangi resiko banjir
- m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran air persawahan untuk meningkatkan produksi sawah/petani
- n. Pelaksanaan Program Jambanisasi
- o. Pelatihan dan Pengembangan Desa Wisata

8.3 Program Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan
- b. Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan
- c. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
- d. Penanganan Mayat Korban Kejahatan dan Kecelakaan
- e. Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
- f. Partisipasi dan Lomba Kebudayaan di tingkat Kabupaten dan Provinsi
- g. Penyelenggaraan Festival Anak Soleh tingkat Kalurahan
- h. Pembinaan remaja masjid dan Forum Komunikasi Remaja masjid tingkat Kalurahan
- i. Pembangunan Balai Budaya tingkat Kalurahan
- j. Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan
- k. Pengembangan kegiatan Ke olah ragaan dan Pembinaan pemuda Olah raga
- l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kalurahan
- m. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (LPMD)
- n. Pembinaan dan Peningkatan kapasitas masyarakat Kelompok Perempuan (PKK)
- o. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Karang Taruna tingkat Padukuhan dan Tingkat Kalurahan

8.4 Program Pemberdayaan Masyarakat

- a. Meningkatkan Pemeliharaan saluran irigasi atau drainase oleh masyarakat
- b. Pelatihan usaha pertanian
- c. Peningkatan kapasitas pamong kalurahan dan BPK
- d. Pembinaan, Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
- e. Pembinaan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

BAB IX PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan merupakan kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Kalurahan.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Lurah, penyusun menyiapkan program yang sifatnya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Kal tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Lurah silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

